



**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DALAM
PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

OLEH:

RIZKA ANANDA ALYAN

NIM. 2120113049



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

(Rizka Ananda Alyan, 2120113049, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas 2024)

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak dan kompleks di Indonesia. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan Karhutla menjadi penting untuk dikaji terutama melalui perspektif hukum lingkungan. Pada penelitian ini membahas terkait *Pertama*, bentuk tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ditinjau dari perspektif hukum lingkungan. *Kedua*, konsep ideal tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan Tanggung jawab hukum pemerintah dalam aspek pengaturan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan turunannya yang memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pemerintah untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Sebagai langkah adaptasi, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 kini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan Menteri ini disusun dengan mempertimbangkan ketentuan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bentuk tanggung jawab hukum pemerintah meliputi tanggung jawab preventif dan responsif, di mana tanggung jawab preventif mencakup upaya-upaya pencegahan melalui penyusunan kebijakan, program edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat, sementara tanggung jawab responsif melibatkan tindakan langsung dalam penanganan kebakaran, termasuk mobilisasi sumber daya untuk pemadaman dan penanganan dampak setelah kebakaran tetapi seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan penegakan hukum yang masih tidak optimal. Tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat diintegrasikan dengan konsep energi berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan energi berkelanjutan dalam kebijakan pengelolaan hutan, pemerintah dapat menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Integrasi energi berkelanjutan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan implementasi konkret dari konsep ideal tanggung jawab hukum yang holistik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Kebakaran Hutan dan Lahan, Hukum lingkungan.

**LEGAL RESPONSIBILITY OF THE GOVERNMENT IN HANDLING FOREST
AND LAND FIRES FROM THE PERSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL LAW**

**(Rizka Ananda Alyan, 2120113049, Master of Law Program, Faculty of Law,
Andalas University 2024)**

ABSTRACT

Forest and land fires (Karhutla) have become one of the most pressing and complex environmental problems in Indonesia. In this context, the government's legal responsibility in handling Karhutla is important to be studied, especially through the perspective of environmental law. This research discusses first, the form of government legal responsibility in handling forest and land fires from the perspective of environmental law. Second, the ideal concept of government legal responsibility in handling forest and land fires. This research uses normative legal research methods using a statutory approach (Statue Approach) and Conceptual Approach. The data source used is secondary data. From this research it can be concluded that the government's legal responsibility in the regulatory aspect of handling forest and land fires has been regulated in various laws and regulations, including Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as well as its derivative regulations that provide a clear legal basis for the government's obligation to prevent, control and cope with forest and land fires. As an adaptation step, the implementation of Law No. 41/1999 and Law No. 32/2009 is now further regulated through Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 on Forest and Land Fire Control. This Ministerial Regulation was prepared by considering the provisions of the division of authority as stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The government's legal responsibilities include preventive and responsive responsibilities, where preventive responsibilities include prevention efforts through the formulation of policies, education programs, and socialization to the public, while responsive responsibilities involve direct action in handling fires, including mobilization of resources for suppression and handling the impact after the fire but such as limited resources, coordination between institutions, and law enforcement that is still not optimal. The government's legal responsibility in handling forest and land fires can be integrated with the concept of sustainable energy. By integrating sustainable energy in forest management policies, the government can create a more comprehensive and sustainable approach. The integration of sustainable energy in handling forest and land fires is a concrete implementation of the ideal concept of holistic legal responsibility.

Keywords: Government Responsibility, Forest and Land Fires, Environmental Law